

KOORDINASI DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA

KOTA TANJUNGPINANG

(Studi Pembinaan Antara DISPORA, KONI, dan PENGKOT Cabang Olahraga Selam Kota Tanjungpinang Tahun 2016)

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

SARAH HENDRYANA

NIM: 130565201133

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2017

**Koordinasi Dalam Pembinaan Olahraga
Kota Tanjungpinang
(Studi Pembinaan Antara Dispora, Koni, Dan Pengkot Cabang Olahraga Selam Kota
Tanjungpinang Tahun 2016)**

**SARAH HENDRYANA
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH**

ABSTRAK

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan yang dilaksanakan ditingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dinas Pemuda dan olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pengurus Kota Cabang Olahraga Selam saling berkoordinasi dalam pembinaan olahraga.

Fokus penelitian ini adalah koordinasi dalam pembinaan olahraga di Kota Tanjungpinang. Masalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah kurangnya koordinasi terkait pembinaan olahraga seperti halnya sarana dan prasarana, dan anggaran untuk pembinaan olahraga. Koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait belum berjalan dengan maksimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang didasari pada indicator teori koordinasi menurut Handyaningrat. Indikator nya terdiri dari komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontinuitas perencanaan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, dan Pengkot cabang olahraga selam dalam pembinaan olahraga di Kota Tanjungpinang koordinasi diantara tiga instansi tersebut masih belum maksimal, sehingga dampak yang terjadi yaitu kurangnya pembinaan untuk cabang olahraga selam. Peneliti memberikan saran agar kinerja dari para pelaksana senantiasa dapat ditingkatkan dan lebih berkoordinasi dengan cabang olahraga selam dan atlit dalam pelaksanaan kegiatan olahraga.

Kata Kunci: *Koordinasi, Pembinaan, Olahraga*

ABSTRACT

The problem of the sports field in the national level as well as in regional level become more complex than ever and related to the society and nation culture, economic, and social dynamics, also the demand of global changing so that it is time for the government to notice all related aspects, adaptive to the development of the sports and the society, also as the instrument of law which be able to support the coaching and the development of the national and regional sports for now and for the future. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) of Tanjungpinang has the duty and the responsibility in searching and in developing athletes to face the matches and the exhibitions which will be held in the province of Kepulauan Riau level. On the effort of improving the achievement of the sports, we need to keep holding the developing of the sports as early as possible through scouting, nurseries, educating, and coaching of the sports achievement based on the knowledge of science. Dinas Pemuda dan Olahraga, Indonesia National Sports Committee, and coordinator of Diving Sports body coordinate each other in the developing of the sports.

The focus of this research is coordinating in the developing of the sports in Tanjungpinang city. The identified problem by the writer in this research is the lack of coordination related to the development of the sports like the infrastructure, the budget for the development of the sports. The coordination which be done by the related agencies not working so well, yet.

The method of the research is the descriptive with the qualitative approach. The instrument of this research is the researcher itself which based on the indicators of the coordination theory based on the Handayaniingrat. The indicators consist of communication, the awareness of the coordination, the participant competence, the deal, commitment, and the incentive coordination, continuity of planning. The data analysis technique which is used in this research is the interactive analysis technique based on Miles and Huberman.

The result of the coordination research between Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, and coordinator of the diving sports body in the development of the sports in the Tanjungpinang city coordinate between three agencies still not reaching the maximum point, so that the impact lead to the lackness of the development of the diving sports. The researcher gave an advice so the efforts of the executive can be improved and more coordinate to the diving sports and the athlete in the implementation of the sports

keyword: Coordination, development, sports

**Koordinasi Dalam Pembinaan Olahraga
Kota Tanjungpinang
(Studi Pembinaan Antara Dispora, Koni, Dan Pengkot Cabang Olahraga Selam Kota
Tanjungpinang Tahun 2016)**

A. Latar Belakang

Olahraga di Indonesia banyak penggemarnya baik di kalangan masyarakat maupun sekolah. Pemerintah telah mencanangkan tekad, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengemari olahraga dan dengan berolahraga mereka merupakan tenaga pembangun yang tangguh. Disamping itu di sekolah juga diberikan olahraga karena olahraga merupakan alat pendidikan agar terjadi keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani. Didalam olahraga dapat ditanamkan kepada anak didik sifat-sifat yang positif, disiplin, kerjasama, sportifitas dan sifat sifat positif yang lain yang menunjang perkembangan jiwa. Olahraga merupakan kebutuhan manusia yang merupakan unsur pokok dan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa (rohani) dan jasmani (raga/tubuh) yang kuat.

Kota Tanjungpinang merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat. Saat ini persaingan olahraga prestasi semakin ketat, prestasi bukan lagi milik perorangan saja, tetapi sudah menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa. Karena dalam pencapaian prestasi suatu olahraga menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat olahraga berjalan dengan baik. Itulah sebabnya cara dan upaya dilakukan oleh suatu daerah atau negara mengupayakan atlitnya menjadi juara diberbagai even besar perlombaan olahraga

Tabel 1.1
Tabel Prestasi Cabor Kota Tanjungpinang

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Kontingen Kota Tanjungpinang		
		Emas	Perak	Perunggu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Atletik	3	1	6
2	Billiar (POBSI)	8	4	5
3	Bina Raga (PABBSI)	1	2	2
4	Bola Basket (PERBASI)	1	0	1
5	Bola Voli (PBVSI)	0	0	1
6	Bridge (GABSI)	0	1	0
7	Bulu Tangkis (PBSI)	1	1	7
8	Catur	1	9	0
9	Dayung (PODSI)	5	0	1
10	Futsal (PSSI)	0	0	1

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang. Kini Olahraga di Tanjungpinang akan memasuki tahap akselerasi untuk mengejar banyaknya ketertinggalan sebelum terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang, adapun yang paling nyata pada saat ini adalah olahraga di Tanjungpinang khususnya cabang olahraga selam sangat

membutuhkan sarana dan prasarana latihan serta pelatih-pelatih yang berkualitas sehingga dapat menciptakan bibit-bibit baru dibidang olahraga dan mewujudkan koordinasi yang sinergi antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan yang dilaksanakan ditingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dinas Pemuda dan olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pengurus Kota Cabang Olahraga Selam saling berkoordinasi dalam pembinaan olahraga.

Program pembinaan untuk cabang olahraga selam ini sejak tahun 2004 sampai tahun 2017 telah diberikan oleh Dispora seperti sarana dan prasarana tetapi kurang memadai, dan kurangnya pembinaan dari KONI yang diberikan kepada cabang olahraga selam ini selama 3 tahun terakhir. Permasalahannya adalah untuk atlit yang ingin mengikuti lomba haruslah memiliki sertifikat. Sedangkan menurut pusat harus atlit yang sudah disertifikasi yang bisa mengikuti pertandingan. Baik itu Kejurda, Kejurnas, sampai Kejuaraan Internasional sekalipun. Atlit selam yang ada di Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki sertifikat berusaha untuk membuat sertifikat selam itu sendiri agar bisa mengikuti pertandingan. Tidak sedikit pula yang menggunakan uang pribadi untuk membuat sertifikat tersebut, biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Pengurus Kota Selam selalu memberikan pembinaan terhadap para atlit nya, yang sering dilakukan oleh pengkot selam terhadap atlit yaitu pendampingan latihan seperti kesiapan fisik dan teknik-teknik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah ”Bagaimana koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Pengurus Kota (PENGKOT) cabang olahraga selam dalam pembinaan olahraga ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi diantara beberapa dinas yang terkait yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pengurus Kota dalam pembinaan olahraga selam.

D. Konsep Teori

1. Koordinasi

Pengertian Koordinasi /ko.or.di.na.si/ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dalam pengertian lain, koordinasi merupakan usaha untuk mengharmoniskan atau mensesuaikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keharmonisan dan keserasian selalu diciptakan baik terhadap tugas-tugas yang bersifat teknis, komersial, finansial, personalia maupun administrasi (Argadiredja, 2001). Handyaningrat (1989:80), koordinasi dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi

- c. Ada tidaknya teknologi informasi
- 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
- 3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
- 4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
- 5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Ketergantungan koordinasi menurut Griffin ada tiga bentuk yaitu terpusat, berurutan dan timbal balik. Saling ketergantungan terpusat (*pooled interdependence*) bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan aktivitas harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan aktivitas distiap satuan untuk memuaskan hasil akhirnya. Saling ketergantungan berurutan (*sequential interdependence*) bila satuan organisasi harus melakukan aktivitas/pekerjaannya lebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*) merupakan hubungan saling memberi dan menerima.

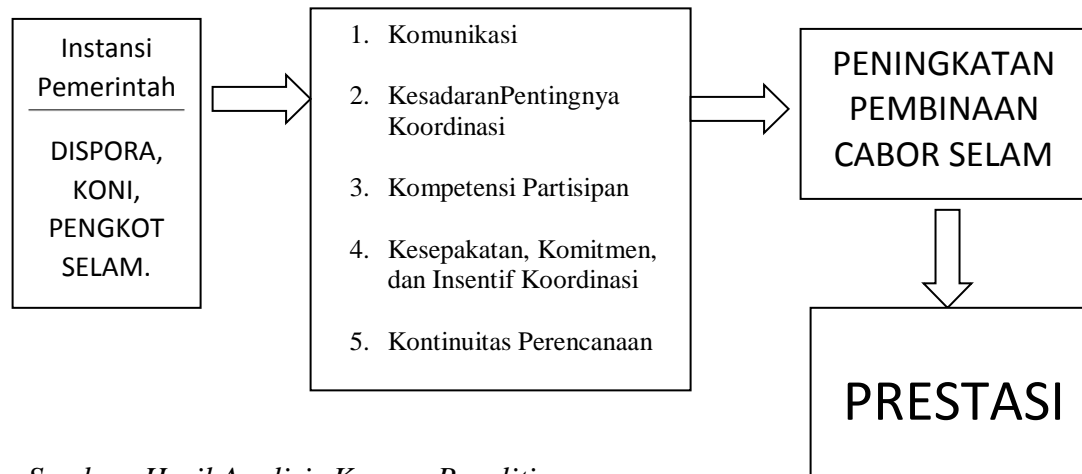
2. Pembinaan

Pembinaan /pem.bi.na.an/ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1996 dijelaskan bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya (Musaneff,1991:11). Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model teori koordinasi yang dipaparkan oleh Handayani (1989:80). Suatu proses koordinasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir



Sumber: Hasil Analisis Konsep Peneliti

E. Hasil Penelitian

Dalam pembahasan bab ini, penulis akan menganalisa tentang Koordinasi Dalam pembinaan olahraga di Kota Tanjungpinang dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Koordinasi Dalam Pembinaan Olahraga, dengan menggunakan teori koordinasi handayani (2002:54) ada lima indikator yang mempengaruhi koordinasi, yakni komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontinuitas perencanaan.

Adapun data yang berkaitan dengan teori tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil dilapangan penelitian ini dan penulis hubungkan dengan teori yang berkaitan dengan koordinasi dalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka tidak mungkin berkembang olahraga selam tanpa didukung oleh pendanaan, tanpa didukung oleh

sarana dan prasarana hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa pengembangan sebuah organisasi membutuhkan dukungan sarana prasarana dan juga membutuhkan komunikasi yang lebih maksimal lagi. Bahwa untuk melahirkan kualitas atlit, kualitas olahraga yang baik harus didukung oleh koordinasi yang efektif, komunikasi yang maksimal dan harus didukung juga oleh sarana dan prasarana yang baik juga. Namun sangat disayangkan pembinaan yang diberikan oleh Dispora dan KONI terhadap Pemkot selam masih kurang efektif, dikarenakan Pemkot selam dan atlit masih mengeluh terkait pembinaan yang diberikan terhadap cabang olahraga selam ini.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Penelitian ini dan penulis hubungkan dengan teori yang berkaitan dengan koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi belum berjalan dengan baik dan masih kurang efektif terhadap Pemkot cabang olahraga selam. Para pelaksana koordinasi sudah mengetahui apa itu koordinasi dan bagaimana cara berkoordinasi, tetapi belum bisa menerapkan dilapangan. Koordinasi yang dilakukan oleh KONI itu cenderung hanya kepada olahraga yang populer saja. Sangat disayangkan cabang olahraga selam ini tidak dijadikan olahraga yang populer padahal kota Tanjungpinang ini adalah daerah kepulauan yang bisa dijadikan potensi bagi para atlit selam dan cabang olahraga selam.

Berdasarkan observasi penelitian ini dan penulis hubungkan dengan teori yang berkaitan dengan koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI pernah melakukan evaluasi terkait koordinasi, tetapi kenyataan dilapangan berbeda dengan yang disampaikan oleh instansi yang terkait. Koordinasi tidak akan berjalan dengan optimal apabila yang menjalankan

koordinasi tersebut belum taat terhadap hasil koordinasi yang telah dilakukan. Hambatan dalam melakukan koordinasi yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan juga minimnya anggaran. Apabila koordinasi tidak dapat dilakukan sesuai yang diharapkan maka organisasi tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien.

3. Kompetensi Partisipan

Berdasarkan hasil dilapangan penelitian ini dan penulis hubungkan dengan teori yang berkaitan dengan koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka didalam kompetensi partisipan sudah ada pihak-pihak yang terlibat didalam koordinasi ini. Dalam melakukan koordinasi dibutuhkan kehadiran dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam mewakili instansinya untuk menentukan keputusan yang tepat dalam melakukan koordinasi. Teori yang digunakan juga sudah sesuai dengan keadaan dilapangan, dikarenakan pada masing-masing instansi sudah ada pejabat yang berwenang didalamnya.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Berkaitan dengan koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka didalam koordinasi diperlukan insentif bagi pelaksana koordinasi. Pemberian insentif ini diberikan guna untuk menambahkan semangat bagi koordinator-koordinator untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis temukan dilapangan terkait dengan ini, yang dinyatakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sudah ada memberikan insentif pada saat pelatihan. KONI mengatakan bahwa insentif diberikan pada saat cabang olahraga termasuk cabang olahraga selam mengikuti event-event dan mendapatkan prestasi. Penulis dapati bahwa belum ada insentif yang diberikan kepada Pengkot selam. Padahal kalau dilihat dari segi prestasi pengkot selam pernah mendapatkan prestasi dan sering juga mengikuti even-even, tetapi insentif yang diberikan tidak ada.

5. Kontinuitas Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi, penelitian ini dan penulis hubungkan dengan teori yang berkaitan dengan koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam, maka didalam koordinasi juga diperlukan perubahan pada hasil koordinasi tersebut. Apabila perubahan tidak ada maka koordinasi yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik. Penulis dapati bahwasanya perubahan yang diberikan pengkot selam terhadap Dispora, dan KONI sudah ada, tetapi terkait pembinaan olahraga, belum ada perubahan yang didapati oleh cabang olahraga selam ini.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai koordinasi dalam pembinaan olahraga (studi pembinaan antara Dispora, KONI, Pengkot cabang olahraga selam kota Tanjungpinang) dapat penulis simpulkan bahwa selama ini koordinasi yang telah dilakukan oleh ketiga instansi tersebut telah berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut dilihat berdasarkan indikator koordinasi sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi dalam koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Pengkot Cabang Olahraga Selam belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dilihat dari kurangnya komunikasi terkait koordinasi yang dilakukan oleh KONI terhadap Pengkot cabang olahraga selam ini. Koordinasi yang dilakukan oleh Dispora kepada KONI seperti Dispora ini suatu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang keolahragaan untuk memajukan program-program pemerintah, Dispora mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai mencari serta membina atlit dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan, dan KONI adalah induk dari seluruh cabang olahraga KONI juga berwenang untuk

mengkoordinasikan dan membina setiap seluruh kegiatan olahraga. Seharusnya KONI dan Dispora berkoordinasi untuk membina atlet seperti contoh dalam hal pendanaan pemerintah memberikan dana pembinaan, lalu KONI mengajukan proposal kepada Dispora lalu Dispora yang merekomendasikan kepada tim verifikasi dan diajukan ke DPPKAD barulah dana pembinaan itu dikeluarkan. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh KONI terhadap Pemkot seperti halnya pembinaan, KONI berhak untuk melakukan pembinaan terhadap Pemkot dikarenakan KONI adalah induk dari seluruh cabang olahraga. KONI berkewajiban untuk membina organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan KONI itu sendiri, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, ada juga dengan penganggaran, dan ada juga seperti pemberian motivasi-motivasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dispora ke Pemkot seperti halnya pembinaan olahraga juga. Apa yang KONI tidak bisa lakukan kepada Pemkot dan Dispora bisa turun tangan melakukan koordinasi kepada Pemkot. Dinas Pemuda dan Olahraga diperbolehkan seperti halnya melakukan pelatihan terhadap pelatih maupun wasit. Tetapi kalau untuk pendanaan Dispora tidak bisa langsung memberikan kepada Pemkot, harus melalui KONI terlebih dahulu.

2. Pada aspek kesadaran pentingnya koordinasi didalam koordinasi antara, Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pemkot Cabang Olahraga Selam belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut berdasarkan masih banyaknya kendala-kendala dalam menjalankan koordinasi ini. Koordinasi didalam pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga selam di kota Tanjungpinang ini masih kurang efektif. Minimnya anggaran untuk cabang olahraga ini mengakibatkan pembinaan tidak berjalan, dan anggaran tidak ada dikarenakan koordinasi yang tidak ada.

3. Pada aspek kompetensi partisipan sudah berjalan baik dikarenakan pada masing-masing instansi baik itu Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pemkot Cabang Olahraga Selam kota Tanjungpinang sudah ada yang terlibat didalamnya.
4. Pada aspek kesepakatan, komitmen dan insentif belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan ada masing-masing instansi yang belum bisa menjalankan kesepakatan yang telah disepakati diawal, disini dapat dilihat bahwa koordinasi antara ketiga instansi ini masih belum berjalan dengan semestinya.
5. Pada aspek kontinuitas perencanaan dalam koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Pemkot Cabang Olahraga Selam ini dilihat dari segi umpan balik terhadap objek sudah ada umpan baliknya, dibuktikan Pemkot Selam ini sering meraih prestasi dan mencetak atlet berprestasi tetapi sangat disayangkan kalau olahraga Selam tidak dimasukkan kedalam olahraga yang populer di Tanjungpinang ini. Kalau dilihat dari perubahan pada hasil kesepakatan, disini belum terlihat perubahan tentang kesepakatan yang telah disepakati diawal.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dispora kepada KONI seperti Dispora ini suatu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang keolahragaan untuk memajukan program-program pemerintah, Dispora mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan, dan KONI adalah induk dari seluruh cabang olahraga KONI juga berwenang untuk mengkoordinasikan dan membina setiap seluruh kegiatan olahraga. Seharusnya KONI dan Dispora berkoordinasi untuk membina atlet seperti contoh dalam hal pendanaan pemerintah memberikan dana pembinaan, lalu KONI mengajukan proposal kepada Dispora lalu Dispora yang merekomendasikan kepada tim verifikasi dan diajukan ke DPPKAD barulah dana pembinaan itu dikeluarkan. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh

KONI terhadap Pengkot seperti halnya pembinaan, KONI berhak untuk melakukan pembinaan terhadap Pengkot dikarenakan KONI adalah induk dari seluruh cabang olahraga.

Komite Olahraga Nasional Indonesia berkewajiban untuk membina organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan KONI itu sendiri, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, ada juga dengan penganggaran, dan ada juga seperti pemberian motivasi-motivasi. Koordinasi yang dilakukan oleh Dispora ke Pengkot seperti halnya pembinaan olahraga juga. Apa yang KONI tidak bisa lakukan kepada Pengkot dan Dispora bisa turun tangan melakukan koordinasi kepada pengkot. Dinas Pemuda dan Olahraga diperbolehkan seperti halnya melakukan pelatihan terhadap pelatih maupun wasit. Tetapi kalau untuk pendanaan Dispora tidak bisa langsung memberikan kepada Pengkot, harus melalui KONI terlebih dahulu.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang penulis berikan antara lain:

1. Diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga, dan KONI ini lebih memaksimalkan lagi komunikasi terkait koordinasi terhadap pengkot selam agar pembinaan olahraga di Kota Tanjungpinang ini maksimal dan dapat menumbuhkan semangat para atlit termasuk cabang olahraga selam ini untuk mengharumkan nama daerah di kancah nasional bahkan internasional sekalipun.
2. Kepada pemerintah perlu dibuat suatu aturan tertulis yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kemudian, dibutuhkan sanksi yang tegas bagi pelaksana koordinasi dan perlu diberikan insentif koordinasi agar menambah semangat kerja dan motivasi pelaksana koordinasi untuk lebih giat dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya, ketiga instansi sebaiknya membuat suatu forum terkait koordinasi dalam pembinaan

olahraga yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari masing-masing instansi sehingga terdapat peraturan yang mengikat.

3. Pemerintah maupun KONI agar lebih memperhatikan olahraga selam ini. Jangan sampai olahraga ini vakum, sangat disayangkan. Jika dilihat dari prestasi yang telah diperoleh dari cabang olahraga selam ini dan para

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta : Balai Pustaka.

A.P. Pandjaitan, 1986. *Dasar-dasar Teori Olahraga dan Organisasi*, Bandung : Rossda Offset.

Cahayani, Ati. 2003. *Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Indeks.

DR. H. Inu Kencana Syafie, M.Si. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Cetakan Pertama : Pustaka Reka Cipta

Handayani, Soewarno. 1989. *adminstrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* CV. Haji Masagung : Jakarta

Harrison, Lisa. 2009. *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana

Harsono, 1988. *Coaching dan Aspek-aspek Psikologi dan Hubungannya dengan Lingkungan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasibuan, 1996. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta : Bumi Aksara.

Harvard Business Essential. *Managing Change And Transition*. Boston : Harvard Business School Publishing Co., 2006

Kamtomo, 1986, *Psikologi Olahraga*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Labolo, Muhadam. 2010. *Memaham ilmu Pemerintahan* .Ed. 3, -4-.
wali Pers

Jakarta : Raja

- M. Furqon H. (2002). *Pembinaan Olahraga Usia Dini*. Surakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Keolahragaan (Puslitbang-OR) Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Monty P, 2002, *Dasar-dasar Psikologi Olahraga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mutohir dan Maksum (2007) *Sport Development Index*.(Konsep, Metodologi dan Aplikasi) Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan. Penerbit PT. Index . Jakarta
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi 1 : Ilmu Pemerintahan baru / Taliziduhu Ndraha*. Jakarta : Rineka Cipta
- Santoso, Slamet., 2010, “Teori-Teori Psikologi Sosial”. Bandung : Refika Aditama
- Uno, Hamzah. , Lamatenggo, Nina. , Satria, Koni. 2010. *Desain Pembelajaran*. Bandung: MQ Publishing.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3)*. Jakarta : Rajawali Pers-, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal-Jurnal:

- Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, Mochtar M. Noh, 2012, “*Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak*.”
- Nur Arief, 2015, “*Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pembinaan Olahraga Tingkat Pelajar Tahun 2014. Naskah Publikasi Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.”

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, 2005

D. Sumber Lain

- Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tahun 2017